

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, S, (2002). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.

Jakarta: Bumi Aksara.

Dunn, William N, (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.

Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. (2005). Good Governanct Dalam Pelayanan Public.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Kotler, Philip (1991). Manajemen Pemasaran, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Jilid Keenam Jakarta: Erlangga

Loina, (2001). Bertajuk Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik dengan Publik. Bandung: CV. Lalolo

Lexy, Moleong J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”.

Bandung

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

Ashariayah, N. (2017). *Analisis Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinina Terpadu Kabupaten Kulon Progo* (Vol. 549).

Amelia, Cherry. dkk (2016). Evaluasi Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang. *Journal accademi*.

Amalia, Nurul. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. *Skripsi*

Dwiputri, Rima. (2017). Evaluasi Dampak Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Tanjung Pinang. *Skripsi*, 1

Jefrisen, (2016). Pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2TSP) Kabupaten Kutai Barat. *Ejurnal ilmu pemerintahan unmul*

- Mustaghfiri, Muhammad Haidar. (2017). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surakarta. *Jurnal wacana public*, 24-32
- Rudi, dkk. (2018). Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju. *Jurnal administrasi*
- Setiyorini, Endah. (2012-2013). Analisis Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai. *Thesis*

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang bangunan gedung

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 2002 Tentang bangunan

KEMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Terkait Pelayanan Publik

Website :

<https://tirto.id/pemkab-menata-sempadan-pantai-selatan-untuk-bandara-kulon-progo-cAKL>.
di akses pada tanggal 20 Juni 2019 pada pukul 20.30

<https://www.antaraneews.com/berita/722738/realisasi-investasi-kulon-progo-capai-rp5240-triliun>.
Diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pada pukul 13.00

<https://www.cendananews.com/2018/12/dpmpt-kulon-progo-temukan-banyak-gudang-belum-berizin.html>.
Di akses pada tanggal 2 Juli 2019 pada pukul 22.15